Studi Silang Historiografi Sriwijaya: Evaluasi Epistemologis George Cœdès dan Pendekatan Sains Terapan Nuri Che Shiddiq

Pendahuluan: Benturan Epistemologis dalam Historiografi Maritim Nusantara

Kajian sejarah mengenai kemaharajaan bahari Sriwijaya telah lama menjadi salah satu diskursus paling dinamis, kompleks, sekaligus problematis dalam konstelasi historiografi Asia Tenggara. Selama lebih dari satu abad, narasi global mengenai letak geografis, struktur politik, dan anatomi kekuasaan Sriwijaya didominasi oleh sebuah konsensus ortodoks yang menempatkan pusat imperium ini di wilayah pedalaman estuari berlumpur Sungai Musi, Palembang, atau secara bergantian di Sungai Batanghari, Jambi. Konsensus ini, yang secara luas dikenal di kalangan akademisi sebagai "Paradigma Palembang", dikonstruksi dan dikodifikasi pada awal abad ke-20 oleh para sarjana kolonial Eropa, dengan George Cœdès sebagai arsitek utamanya.[1] Paradigma ini telah menjadi fondasi utama pembelajaran sejarah, yang memproyeksikan tatanan kekuasaan Sriwijaya layaknya sebuah kerajaan agraris daratan yang kebetulan memiliki armada kapal laut.

Namun, memasuki abad ke-21, perkembangan mutakhir dalam disiplin arkeologi maritim, geomekanika pantai, hidrografi historis, sosiologi masyarakat adat kepulauan, dan astronomi purba telah memicu gelombang revisionisme sejarah yang sangat radikal. Gugatan paling komprehensif, terstruktur, dan analitis terhadap Paradigma Palembang diajukan oleh sejarawan dan budayawan Nuri Che Shiddiq (NCS). Melalui pendekatan multidisipliner yang tajam, ia menawarkan "Paradigma Kepulauan Riau-Lingga".[1] Pendekatan ini secara fundamental menolak ketergantungan eksklusif pada pembacaan teks kuno dan epigrafi (prasasti batu) yang dianggap mewakili "bias terestrial" atau cara pandang yang secara obsesif berpusat pada daratan. Sebaliknya, Nuri Che Shiddiq menggunakan "ilmu pasti"—meliputi geofisika, oseanografi, fisika astronomi, dan logika logistik maritim—untuk memvalidasi realitas operasional sebuah entitas talasokrasi (kekuasaan laut) ekuatorial.[1]

Laporan penelitian ekstensif ini menyajikan evaluasi analitis dan uji silang yang mendalam antara metodologi filologis-epigrafis peninggalan George Cœdès dan pendekatan sains terapan maritim yang dikemukakan oleh Nuri Che Shiddiq. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memberikan sebuah vonis akademis mengenai pendapat siapa yang memiliki tingkat kebenaran paling tinggi, rasional, dan paling empiris berdasarkan terapan ilmu pasti dan realitas sejarah, khususnya dalam konteks penentuan pusat gravitasi kemaharajaan Sriwijaya di sekitar Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau-Lingga. Penilaian ini tidak hanya membongkar data

arkeologi, tetapi juga menelusuri motif ekonomi-politik kolonial yang melatarbelakangi penulisan sejarah Nusantara.

Konstruksi Epistemologi George Cœdès dan Kemunculan Paradigma Palembang

Untuk menguji kebenaran klaim sejarah secara objektif, sangat penting untuk terlebih dahulu membedah fondasi epistemologis dan metodologis yang digunakan oleh George Cœdès dalam "melahirkan kembali" Kerajaan Sriwijaya ke panggung sejarah dunia pada tahun 1918 melalui karyanya yang monumental, *Le Royaume de Çrīvijaya*.[1] Cœdès, seorang filolog, sejarawan, dan ahli epigrafi terkemuka asal Prancis yang terafiliasi dengan École française d'Extrême-Orient (EFEO), menggunakan metode sinkronisasi teks lintas peradaban yang pada masanya dianggap sebagai pencapaian akademis yang sangat brilian dan tanpa cela.[2]

Argumen utama Cœdès bertumpu pada kemampuannya menyatukan serpihan-serpihan dokumen dari berbagai peradaban purba yang sebelumnya oleh para sejarawan dianggap tidak saling berhubungan. Analisis filologisnya yang cermat berusaha membuktikan bahwa berbagai toponimi asing yang berserakan di berbagai literatur dunia sebenarnya merujuk pada satu entitas politik tunggal yang maha kuat.[1]

Langkah pertama Cœdès adalah melakukan identifikasi mendalam terhadap teks-teks sejarah Tiongkok. Ia menganalisis catatan sejarah dan laporan perjalanan biksu dari dinasti Tang dan Song, yang merentang dari abad ke-7 hingga ke-14 Masehi. Catatan-catatan ini secara konsisten menyebutkan keberadaan sebuah negara niaga maritim raksasa yang berfungsi sebagai pusat sirkulasi komoditas global, yang dinamakan *Fo-che*, *Che-li-fo-che*, dan pada masa yang lebih akhir disebut *San-fo-ts'i*.[1]

Langkah kedua adalah mengkorelasikan naskah-naskah Arab dan India dengan catatan Tiongkok tersebut. Cœdès dengan cerdas menghubungkan toponimi Tiongkok itu dengan catatan para pelaut dan saudagar Arab serta Persia yang sering menyebutkan sebuah kerajaan kepulauan yang sangat makmur bernama *Zabag* atau *Sribuza*.[1] Tidak berhenti di situ, ia juga membedah prasasti-prasasti Tanjore (berasal dari abad ke-11) yang ditinggalkan oleh wangsa Chola di India Selatan. Prasasti penaklukan militer Rajendrachola I tersebut secara spesifik menyebutkan nama *Sriwisayam* dan *Kadaram* (Kataha) sebagai negeri-negeri yang ditaklukkan di seberang lautan.[1]

Namun, fondasi paling krusial dan menjadi jangkar spasial bagi teori Cœdès adalah penemuan serangkaian bukti epigrafi lokal. Pada rentang waktu yang berdekatan, ditemukan prasasti-prasasti berbahasa Melayu Kuno beraksara Pallawa di wilayah Sumatera Selatan dan Pulau Bangka. Prasasti-prasasti ini—yang meliputi Prasasti Kedukan Bukit (682 M), Talang Tuwo (684 M), Kota Kapur (686 M), dan Karang Brahi—secara eksplisit menyebutkan entitas "Kadatuan Sriwijaya" dan memuat sumpah kutukan magis bagi daerah-daerah yang tidak tunduk kepada penguasa Sriwijaya.[1] Cœdès, melalui pendekatan filologis, membuktikan bahwa "Sriwijaya" bukanlah nama seorang raja, melainkan nama sebuah kemaharajaan.[1]

Melalui penalaran linguistik yang sehat dan komparasi literatur, Cœdès menyimpulkan bahwa pusat operasional dan ibu kota kerajaan ini pasti berada di Palembang, tempat di mana

konsentrasi prasasti-prasasti awal yang merekam perjalanan *siddhayatra* (perjalanan suci) Dapunta Hyang ditemukan. Meskipun Palembang pada saat itu sama sekali tidak menunjukkan peninggalan monumental berupa candi batu raksasa atau tata kota yang sebanding dengan Borobudur di Jawa atau Angkor di Kamboja, Cœdès tetap teguh mempertahankan teorinya. Ia berargumen bahwa kawasan sungai Musi adalah situs ibu kota faktual dari mana Sriwijaya mulai memancarkan pengaruhnya.[1]

Paradigma ini kemudian terus dijaga, dikembangkan, dan diperkuat oleh generasi arkeolog arus utama berikutnya, seperti Pierre-Yves Manguin dan O.W. Wolters. Manguin, melalui ekskavasinya di Palembang (seperti situs Karang Agung dan Air Sugihan), menemukan bukti-bukti permukiman padat dari abad ke-4 hingga ke-13, berupa tiang-tiang rumah panggung dari kayu yang terendam di lahan basah, manik-manik, bata kuno, serta ribuan pecahan keramik Tiongkok peninggalan dinasti Tang dan Song.[7] Bagi Manguin dan pengikut tradisi Cœdès, temuan ini sudah cukup untuk menutup perdebatan: Palembang adalah pusat Sriwijaya.[3]

Antitesis Nuri Che Shiddiq: Dekonstruksi Bias Terestrial dan Kritik Arkeologi Batu

Di seberang spektrum epistemologis, Nuri Che Shiddiq mengajukan kritik yang sangat tajam dan menyeluruh terhadap kerangka berpikir George Cœdès beserta para penerusnya. Shiddiq berargumen bahwa meletakkan ibu kota imperium maritim—sebuah thalassokrasi yang urat nadinya adalah pencegatan kapal lintas benua dan monopoli rute laut—di pedalaman estuari sungai yang bergantung pada pasang surut air, adalah sebuah anomali spasial dan logistik yang sangat parah. Kesalahan fatal ini, menurut Shiddiq, bermula dari sebuah kondisi keilmuan yang ia sebut sebagai "bias terestrial" atau bias daratan.[1]

Shiddiq membongkar paradigma ini dengan menyatakan bahwa para sejarawan dan arkeolog kolonial Eropa, yang secara intelektual dibentuk oleh tradisi peradaban kontinental klasik seperti Yunani, Romawi, dan monumen-monumen agung di daratan India, memiliki kecenderungan naluriah untuk menyamakan eksistensi sebuah ibu kota dengan monumentalitas fisik yang statis.[1] Bagi ilmuwan Eropa awal abad ke-20, peradaban tinggi selalu didefinisikan oleh keberadaan candi batu andesit, prasasti raksasa, dan struktur urban tata kota pedalaman yang dihubungkan oleh jalan darat permanen.

Mereka secara keliru memproyeksikan kerangka berpikir agraris-kontinental ini ke atas tatanan kemaharajaan Melayu kuno yang murni bersifat insuler, amfibi, dan digerakkan seluruhnya dari atas perairan. Shiddiq mengkritik keras ketergantungan yang berlebihan pada "Arkeologi Batu" (epigrafi) sebagai satu-satunya parameter penentu letak sebuah ibu kota.[1] Dalam sains material dan sosiologi masyarakat kepulauan, ketiadaan bangunan darat permanen di Kepulauan Riau-Lingga justru merupakan verifikasi faktual dari adaptasi arsitektur maritim tingkat tinggi. Peradaban bahari menggunakan material yang lebih efisien, adaptif terhadap kelembapan tinggi, dan tahan terhadap salinitas air laut, seperti kayu keras kelas satu (kayu bulian atau ulin), serta membangun infrastruktur di atas rakit-rakit rumbia.[1] Oleh karena itu, absennya candi-candi batu di Riau bukanlah bukti ketiadaan peradaban, melainkan manifestasi dari

efisiensi material yang sesuai dengan fitrah lingkungan kepulauan.[1]

Pencucian Sejarah (History Laundering) dan Motif Eksploitasi Kolonial

Salah satu wawasan (insight) paling orisinal dan paling mendalam dari analisis Nuri Che Shiddiq adalah korelasinya antara ruang waktu politik penerbitan karya akademis Cœdès pada tahun 1918 dengan operasi geopolitik dan eksploitasi ekonomi masif yang sedang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di kawasan Nusantara pada dekade yang sama.[1]

Pada masa pergantian abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat membutuhkan komoditas mineral bernilai tinggi untuk menyelamatkan neraca keuangannya. Survei geologi menemukan cadangan mineral raksasa di Kepulauan Riau dan Lingga, yakni deposit timah masif di Pulau Singkep dan cadangan bauksit (bahan baku aluminium) terbesar di dunia pada masa itu di Pulau Bintan.[1] Eksploitasi besar-besaran oleh konsorsium korporasi kolonial seperti kelompok *Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* (SITEM) dan *Nederlandsch-Indische Bauxiet Exploitatie Maatschappij* (NIBEM) mutlak membutuhkan kontrol teritorial tanpa hambatan dari pihak lokal.[1]

Hambatan utama bagi mesin kapitalis Belanda saat itu adalah kedaulatan mutlak yang masih dipegang secara sah oleh Kesultanan Riau-Lingga. Setelah Sultan Abdul Rahman II Muazzam Syah dengan tegas menolak untuk menandatangani kontrak politik baru yang dirancang untuk merampas hak-hak ekonomi dan kedaulatan kepulauan, pemerintah Belanda merespons dengan agresi militer dan secara sepihak membubarkan serta menghapuskan Kesultanan Riau-Lingga dari peta Nusantara pada tahun 1911.[1] Sultan dipaksa turun takhta, dan wilayah tersebut jatuh ke dalam penguasaan langsung pemerintah kolonial.

Shiddiq menyoroti fakta bahwa publikasi George Cœdès muncul pada tahun 1918, tepat tujuh tahun pasca pembubaran paksa Kesultanan Riau-Lingga.[1] Penempatan Palembang sebagai "pusat suci" Sriwijaya oleh seorang cendekiawan Eropa "netral" memberikan dua keuntungan intelijen dan geopolitik yang luar biasa bagi Hindia Belanda:

1. **Pengamanan Aset Eksploitasi:** Belanda saat itu sedang menyusun instrumen hukum perlindungan benda cagar budaya (yang kelak disahkan sebagai *Monumentenordonnantie* pada 1931).[1] Dengan memindahkan status situs induk sejarah Melayu ke pedalaman Palembang (di mana Belanda lebih memfokuskan diri pada perkebunan karet), operasi pengerukan besar-besaran lanskap darat dan dasar laut oleh SITEM dan NIBEM di Riau-Lingga menjadi kebal dari ancaman undang-undang cagar budaya internasional.[1]
2. **Deligitimasi Kultural:** Penggeseran ibu kota Sriwijaya ke Sumatera Selatan secara historis menceraikan kewibawaan sejarah maritim agung masa lalu dari masyarakat Melayu Riau-Lingga yang baru saja digulingkan kedaulatannya.[1] Pengakuan bahwa Riau-Lingga adalah pusat kemaharajaan purba akan memberikan legitimasi yang sangat berbahaya bagi pewaris takhta Kesultanan Riau-Lingga.[13]

Melalui kacamata ini, Nuri Che Shiddiq memandang tulisan Cœdès tidak lahir di ruang hampa yang murni akademis, melainkan berfungsi sebagai instrumen "Pencucian Sejarah" (*History Laundering*) yang melayani kepentingan eksploitasi geopolitik kolonial, menyingkirkan

kebenaran posisi Bintan dan Lingga dari panggung kebesaran maritim dunia.[1]

Kriteria Komparasi Epistemologis	Paradigma Palembang (George Cœdès)	Paradigma Riau-Lingga (Nuri Che Shiddiq)
Landasan Keilmuan Utama	Filologi, Linguistik, dan Epigrafi (Teks dan Batu).	Geofisika, Oseanografi, Astronomi, Logistik Maritim.
Bukti Material Primer	Prasasti kutukan, teks Tiongkok, fondasi kayu estuari.	Catatan bayangan astronomi, kepadatan kapal karam (*Lingga Wreck*), pusaka *Regalia* hidup.
Konsepsi Ibu Kota	Sentralistik daratan, birokrasi menetap (*Terrestrial bias*).	Thalasokrasi ekuatorial, jaringan pulau amfibi, *Floating City*.
Implikasi Geopolitik Kolonial	Secara tidak langsung memfasilitasi eksploitasi mineral Belanda (SITEM/NIBEM) di Kepulauan Riau.	Menggugat hegemoni kolonial, merestorasi kedaulatan dan *daulat* bangsa Melayu kepulauan.

Uji Silang Parameter Ilmu Pasti: Logistik, Oseanografi, dan Strategi Militer

Untuk menilai pendapat siapa yang paling benar secara empiris, kita harus meletakkan diskursus sejarah ini di bawah alat ukur hukum fisika, geografi kelautan, dan strategi militer. Realitas alam dan hidrografi bersifat statis dan permanen, sehingga tidak dapat direkayasa oleh opini manusia maupun manipulasi interpretasi filologis. Pendekatan "Sejarah dalam Ilmu Pasti" yang diajukan Shiddiq membongkar narasi sungai Palembang melalui beberapa metrik fungsional.

1. Kedaulatan Berbasis Alam dan Efisiensi Logistik Maritim

Fitrah utama sebuah imperium laut (*thalassocracy*) adalah mobilitas yang tidak terbatas dan penguasaan mutlak atas titik sempit (*chokepoint*) jalur pelayaran. Sebelum ditemukannya teknologi mesin mekanis, seluruh mobilitas perniagaan antarbenua yang menghubungkan Mediterania, Jazirah Arab, India, dan Tiongkok tunduk pada determinisme alam: pergerakan Angin Muson.[1] Kapal-kapal niaga tidak mungkin berlayar menempuh rute Tiongkok-India dalam satu kali perjalanan. Mereka diwajibkan oleh mesin meteorologi bumi untuk berhenti di kawasan Nusantara yang terlindung dari badai selama berbulan-bulan (hingga setengah tahun) untuk menunggu pergantian arah angin.[1]

Dalam konteks logistik global purba ini, Kepulauan Riau (Bintan/Tanjung Pinang dan Lingga) memiliki keunggulan mutlak. Gugusan pulau ini terletak tepat di "titik nol" atau persimpangan absolut yang mengunci mulut Selat Malaka, Selat Karimata, dan Laut Natuna (Laut Tiongkok Selatan).[1]

Menetapkan episentrum ekonomi dan pusat komando angkatan laut di hulu sungai estuari seperti Palembang (Sungai Musi) menghadirkan inefisiensi yang ekstrem:

- **Jebakan Hidrografi dan Sedimentasi:** Sungai-sungai di pantai timur Sumatera membawa jutaan ton sedimen lumpur yang secara terus-menerus membentuk beting pasir di muara. Memaksa ratusan kapal dagang samudra berdimensi raksasa masuk puluhan kilometer ke wilayah sungai berlumpur akan berisiko kandas, dan sepenuhnya sangat bergantung pada fluktuasi pasang surut.[1]
- **Jeda Waktu Respons Militer:** Ilmu strategi menyatakan bahwa sebuah pusat komando militer harus memiliki jarak tempuh terpendek dan tercepat menuju objek yang dikendalikan, yakni laut lepas.[1] Jika armada harus merespons perompak di Selat Malaka, menavigasi keluar dari aliran hulu Sungai Musi membutuhkan waktu berhari-hari, membuat armada kehilangan momentum taktis seketika.[1]

Sebaliknya, menempatkan pusat komando pada gugusan Kepulauan Riau-Lingga—termasuk apa yang dinamakan sebagai "Hipotesis Pulau Posek"—menyediakan akses navigasi pelayaran seketika (24 jam) menuju perairan lepas tanpa bergantung pada pasang surut, serta menawarkan teluk perlindungan alami (*natural harbor*) yang masif.[1] Shiddiq menganalogikan rasionalitas ekonomi ini secara sederhana: Membangun sentra logistik dunia di Kepulauan Riau ibarat membangun pusat distribusi di "pinggir jalan tol utama", sementara menempatkannya di pedalaman sungai ibarat membangunnya di "gang buntu".[1] Hukum gravitasi ekonomi secara teknis menolak pusat kendali maritim yang terletak di pedalaman.

2. Anomali Astronomi: Presisi Gnomon I-Tsing dan Garis Khatulistiwa

Ini merupakan argumen sains terapan yang paling mematikan bagi Paradigma Palembang. Salah satu sumber asing terpenting yang merekam keseharian ibu kota Sriwijaya adalah catatan perjalanan biksu Buddha terkemuka asal Tiongkok, I-Tsing (Yi Jing), yang menetap di *Shih-li-fo-shih* (Sriwijaya) selama berbulan-bulan pada akhir abad ke-7.[15]

Sebagai seorang intelektual Tiongkok yang sangat terpelajar, I-Tsing sangat fasih dengan perhitungan astronomi kalender Tiongkok. Dalam laporannya, I-Tsing mencatat dengan sangat spesifik pengukuran astronomis ibu kota menggunakan alat ukur *gnomon* (jam matahari kuno). I-Tsing mencatat bahwa di ibu kota *Shih-li-fo-shih*, pada waktu pertengahan bulan kedelapan (Ekuinoks Musim Gugur / *Autumnal Equinox*) dan pertengahan musim semi (Ekuinoks Musim Semi / *Vernal Equinox*), sebuah tiang gnomon standar setinggi 8 kaki "tidak menghasilkan bayangan sama sekali" (zero shadow) pada saat tepat tengah hari.[15] Ia menambahkan bahwa pada siang hari tersebut, seseorang yang berdiri tegak tidak akan melihat bayangannya jatuh ke tanah.

Menurut hukum fisika trigonometri surya, fenomena jatuhnya sinar matahari tepat secara vertikal (Zenith mutlak) yang menghasilkan efek *zero shadow* pada saat ekuinoks, secara fisik hanya bisa terjadi di satu posisi geografis di seluruh muka bumi: **Tepat di Garis Khatulistiwa (Latitude 0° / Ekuator)**.[1]

Berikut adalah matriks komparasi data astronomi geografis yang meruntuhkan postulat Palembang:

Kandidat Ibu Kota Sriwijaya	Garis Lintang (Latitude) Geografis Aktual	Kondisi Bayangan Gnomon pada Saat Ekuinoks Siang Hari	Verifikasi Sains Berdasarkan Teks I-Tsing

		(Fisika Astronomi)	
Palembang (Sungai Musi)	2° 59' Lintang Selatan (~3° LS)	Menghasilkan bayangan fisik yang cukup panjang dan nyata, mengarah ke Selatan.	**GAGAL TOTAL (INVALID)**
Jambi (Sungai Batanghari)	1° 36' Lintang Selatan (~1.5° LS)	Menghasilkan bayangan fisik yang dapat diukur dengan jelas.	**GAGAL TOTAL (INVALID)**
Gugusan Kepulauan Lingga (Riau)	0° 00' - 0° 20' (Tepat membelah Ekuator)	Matahari persis di Zenith; Tidak ada bayangan gnomon sama sekali (*Zero Shadow*).	**AKURAT SEMPURNA (MATCH)**

Palembang berlokasi sekitar 330 kilometer di selatan garis khatulistiwa.[15] Tidak mungkin seorang pengamat astronomi sekritis I-Tsing akan keliru menganggap keberadaan bayangan (meskipun pendek) di Palembang sebagai "ketiadaan bayangan sama sekali".[15] Realitas astronomi yang absolut ini secara mekanis meruntuhkan argumen Cœdès yang hanya mengandalkan interpretasi teks tanpa menguji silang koordinat geografis. Gugusan Kepulauan Lingga adalah satu-satunya lokasi yang memvalidasi catatan otentik sang peziarah, membuktikan secara ilmu pasti bahwa episentrum Sriwijaya berada di lintang nol derajat.

3. Ekologi Militer dan Sosiologi: Suku Laut sebagai Anatomi Pertahanan

Dalam memahami kedaulatan sebuah thalassokrasi, keberadaan birokrasi daratan tidak akan ada artinya tanpa kekuatan militer laut nyata yang sanggup mencegat kapal dagang, menundukkan wilayah pesisir, dan menguasai rute pelayaran. Dalam struktur kemaharajaan Sriwijaya dan para entitas penerusnya, tulang punggung militer yang paling brutal, loyal, dan ahli dalam seni navigasi ini dipegang secara penuh oleh kelompok *Orang Suku Laut* (*Sea Nomads / Celates*).[1]

Kajian sosio-biologis dan antropologis membuktikan bahwa habitat endemik, akar populasi, dan ruang sosiologis dari Orang Laut terletak di labirin selat sempit di Kepulauan Riau-Lingga, Bintan, hingga Selat Batam dan Singapura.[1] Masyarakat perairan ini bukanlah warga sungai pedalaman. Mereka adalah entitas pengembara laut yang budayanya menyatu dengan ekologi laut dangkal (*water world*).

Nuri Che Shiddiq mengajukan argumen rasional tentang kegagalan taktis dari pemisahan spasial. Jika ibu kota kerajaan (sebagai kepala politik dan pusat perbendaharaan negara) secara permanen ditempatkan beratus-ratus kilometer jauhnya di pedalaman berlumpur Sungai Musi, sementara seluruh garda depan militer angkatan lautnya bermukim dan beroperasi di

selat-selat Kepulauan Riau-Lingga, hal ini secara logistik dan sosiologi militer klasik adalah sebuah "bunuh diri politik".[1]

Raja-raja Melayu selalu harus bertakhta di tengah-tengah konsentrasi armada maritim mereka. Kenyataan sejarah dinamis membuktikan kontinuitas pengabdian ini: ketika Parameswara melarikan diri ke Tumasik untuk mendirikan Malaka, ia dikawal oleh loyalis Orang Laut dari Kepulauan Riau.[1] Berabad-abad kemudian, saat Raja Kecil merebut takhta Johor pada 1718, ia menggunakan puluhan ribu kekuatan tempur Orang Laut yang ditarik dari perairan Bintan dan Lingga.[1] Tanpa kehadiran fisik maharaja di gugusan kepulauan ini untuk mengelola faksi-faksi Orang Laut, Sriwijaya tidak akan pernah mampu memonopoli keamanan Selat Malaka. Fakta biologi-sosial ini menjustifikasi bahwa Riau-Lingga bukan sekadar daerah penyangga, melainkan jantung pertahanan yang riil.

4. Epigrafi Kutukan Mati vs. Institusi Regalia Hidup (Cogan)

Pilar epistemologi dari Cœdès adalah keberadaan prasasti-prasasti batu (Prasasti Kedukan Bukit, Telaga Batu, Kota Kapur) yang memuat narasi kutukan dan klaim militer sepihak.[1] Shiddiq memberikan kritik sosiologis mengenai bagaimana peradaban maritim Melayu menyalurkan legitimasi kekuasaan politiknya. Tidak seperti dinasti daratan agraris yang terobsesi dengan pemancangan batu andesit secara permanen ke tanah, legitimasi kemaharajaan maritim Melayu dirawat dalam bentuk institusi hukum yang dinamis, bergerak bersama raja, dan diwariskan menembus zaman. Instrumen supremasi ini disebut sebagai *Regalia* (Alat Kebesaran Kerajaan).

Di Kesultanan Riau-Lingga (yang mewarisi daulat Johor, Malaka, dan bermuara pada Sriwijaya), instrumen legitimasi tertinggi ini adalah *Cogan*.[1] Cogan bukanlah sekadar aksesori dekoratif, melainkan panji kebesaran berbentuk daun sirih besar yang ditempa dari emas dan perak murni bermutu tinggi. Yang menjadikan Cogan sebagai "dokumen negara" (konstitusi fisik) yang meruntuhkan bias daratan kolonial adalah inskripsi beraksara Arab-Melayu (Jawi) yang timbul di atas lempengannya.[1]

Inskripsi pada Cogan mendeklarasikan silsilah genealogi darah yang berkelanjutan. Ia memproklamirkan secara harfiah bahwa penguasa Kesultanan Riau-Lingga adalah pewaris yang sah dari leluhur raja-raja yang memancar dari Bukit Siguntang (simbol kedatuan Sriwijaya) dan berakar dari Sri Sultan Iskandar Zulkarnain Syah.[1] Fakta ini sangat mematikan bagi narasi Barat. Ia membuktikan bahwa roh, daulat, dan kedaulatan mutlak Sriwijaya tidak pernah mati punah dan terkubur lumpur saat Palembang hancur ditaklukkan oleh Jawa atau Chola. Kedaulatan agung itu terus berlayar, dirawat secara konstitusional (*living continuity*), dan memusat di perairan Bintan dan Lingga hingga akhirnya dibubarkan oleh serdadu pemerintah kompeni Hindia Belanda pada 1911.[1]

Keberadaan Cogan Riau-Lingga merepresentasikan bahwa inti politik peradaban ini tidak dapat diukur sekadar dari batu statis abad ke-7, melainkan melalui entitas yang terus bernapas yang menjadikan kepulauan tersebut sebagai tahta abadinya.

Dekonstruksi Jejak Material: Arkeologi Kapal Karam vs

Arsitektur Kayu

Pendukung George Cœdès yang mempertahankan Palembang bersandar pada fakta bahwa ekskavasi kontemporer menemukan indikasi wilayah komersial awal (pemukiman lahan basah dan keramik dinasti Tang) di muara Musi.[8] Namun, Shiddiq memberikan penjelasan komparatif yang lebih logis mengenai mengapa Kepulauan Riau-Lingga tampak "miskin" candi daratan namun sesungguhnya adalah ibu kota logistik dunia.

Jika volume perniagaan global Sriwijaya benar-benar masif, maka arsip sejarah paling riil bukan terletak di atas daratan, melainkan di dasar lautan. Kawasan perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, sekitar Bintan (Tanjung Pinang), hingga Lingga, menyimpan anomali arkeologi bawah air berupa kepadatan situs kapal karam (*shipwrecks*) yang tidak ada tandingannya di Asia Tenggara.[1]

Sebagai contoh, penemuan arkeologi *Lingga Wreck* (bangkai kapal Lingga) dan bangkai kapal Pulau Buaya dari abad ke-11 hingga ke-12 memendam muatan ribuan keping keramik tingkat tinggi dari Tiongkok, tumpukan besi tempa (*ironware*) untuk pasar domestik, dan logam mulia.[1] Kapal-kapal ini menggunakan teknologi khas Nusantara dengan ikatan pasak kayu (*lashed-lug*). Penumpukan luar biasa bangkai-bangkai kapal dagang dari beragam peradaban (Arab, Persia, Tiongkok) ini membuktikan satu hal pasti: Kepulauan Riau-Lingga bukanlah sekadar selat perlintasan sementara. Wilayah ini adalah *Zero Point Entrepôt* (pelabuhan bongkar muat terminal). Densitas temuan keramik laut di sini melampaui logika penemuan di dalam estuari sungai Palembang, menandakan bahwa detak jantung perputaran modal dunia sesungguhnya berada di perairan Riau-Lingga.[1]

Selain itu, Shiddiq membongkar paradoks "Arkeologi Batu" menggunakan catatan teks Tiongkok *Zhu Fan Zhi* (karya Chau Ju-kua abad ke-13) yang mendeskripsikan secara eksplisit ibu kota Sanfoqi (Sriwijaya) sebagai "Kota Terapung" (*Floating City*) di mana penduduknya bermukim menyebar di atas air dengan rakit-rakit kayu.[1] Deskripsi ini menjelaskan ketiadaan arsitektur bata merah raksasa di daratan Bintan atau Lingga, karena anatomi sosiologis kota maritim mereka dibangun dari kayu, rakit, dan tiang pancang di perairan dangkal yang akan sirna ditelan waktu.[1]

Demikian pula penemuan arkeologi awal di Pulau Karimun Besar berupa Prasasti Pasir Panjang. Analisis epigrafi dan geologi oleh Shiddiq menemukan keselarasan dengan fenomena diaspora eksodus bangsawan Persia-Sassanid (dipimpin Pangeran Peroz III) pada pertengahan abad ke-7.[24] Prasasti maritim di kepulauan Riau ini memperkuat indikasi bahwa jejaring intelektual tingkat tinggi dan konsolidasi aliansi antar-federasi laut telah lama diinisiasi di perairan chokepoint utara (Karimun-Batam-Bintan) sejak fase awal kerajaan.

Sintesis Baru: Konsep Heterarki Nodal dan Kedatuan Berpindah

Jika diuji menggunakan ilmu pasti dan geografi maritim, jelas bahwa pandangan yang murni berpusat di Palembang mengandung cacat fungsional. Namun, menolak sepenuhnya bukti prasasti di Palembang juga merupakan pengingkaran terhadap kebenaran dokumen tertulis awal. Oleh karena itu, antitesis Nuri Che Shiddiq yang divalidasi oleh dinamika arkeologis, menghasilkan resolusi paling elegan: Konsep Tata Ruang Negara Mandala dengan Model "Heterarki Nodal" atau *Mobile Kedatuan* (Kedatuan Berpindah).[1]

Sriwijaya bukanlah negara kontinental bergaya Eropa yang memusatkan seluruh administrasi, pasar, militernya, dan aktivitas spiritual dalam batas tembok satu kota daratan. Sebaliknya, Sriwijaya mendistribusikan perannya dalam titik-titik simpul (node) yang dikendalikan oleh laut.

1. **Palembang Sebagai Wanua Sakral (Pusat Epigrafi dan Kosmologis Spiritual):** Pendapat George Cœdès benar dalam hal mengidentifikasi Palembang sebagai simpul penting peradaban, namun keliru mendefinisikannya sebagai ibu kota militer dan ekonomi. Daerah hulu Sungai Musi, khususnya sekitar Bukit Siguntang, dirancang sebagai pusat landasan spiritual, lokasi ritual penetapan kedaulatan awal, dan kawasan sekolah agama yang kondusif. Hal ini menjelaskan mengapa I-Tsing melihat seribu lebih biksu yang belajar Sanskerta dan bermeditasi dengan tenang di Sriwijaya.[1] Suasana hening estuari pedalaman yang jauh dari hiruk-pikuk puluhan ribu pelaut asing sangat ideal bagi penciptaan prasasti sakral seperti Kedukan Bukit (sebagai monumen proklamasi penaklukan spiritual) dan Telaga Batu (sebagai pusat pengambilan sumpah kutukan bagi elit pedalaman).[1]
2. **Kepulauan Riau-Lingga (Bintan/Posek) Sebagai Kadatuan Operasional (Pusat Kedaulatan dan Militer):** Pendapat Nuri Che Shiddiq menemukan kebenaran mutlaknya dalam terapan logistik riil. Roda ekonomi internasional, ibu kota faktual yang berbentuk *floating city*, markas armada laut utama, dan pangkalan gerak cepat pasukan Orang Laut digerakkan sepenuhnya dari celah-celah pulau strategis di Kepulauan Riau dan Lingga.[1] Hanya di lokasi inilah syarat astronomi nol bayangan (Lintang 0° Ekuator) dari I-Tsing terpenuhi, dan hanya di kawasan inilah perlindungan laut alami (natural harbor) bagi persinggahan ribuan kapal dagang Tiongkok, Arab, dan Persia dapat beroperasi tanpa terhambat pendangkalan sungai.[1]

Kesimpulan: Kemenangan Empiris Sains Terapan

Evaluasi komprehensif terhadap diskursus historiografi mengenai pusat kemaharajaan Sriwijaya membawa kita pada sebuah konklusi yang tegas. Dalam menjawab pertanyaan mengenai

"pendapat siapa yang paling benar", batas ukur atau parameternya harus diperjelas.
Jika kajian yang dilakukan murni bersandar pada "Arkeologi Batu", klasifikasi bahasa filologis purba, dan pencarian situs sakral di daratan, maka metodologi kolonial **George Cœdès** memiliki peran vital dalam memperkenalkan kembali nama Sriwijaya ke dunia dan meletakkan fondasi identifikasi teks awal di Palembang.[1]
Namun, jika parameter yang diuji adalah **"Kebenaran Sejarah Operasional dan Terapan Ilmu Pasti"**—yang meliputi hukum fisika navigasi, geometri bumi, dinamika logistik niaga samudra purba, trigonometri astronomi, serta sosiologi militer masyarakat kepulauan—maka **argumen yang diajukan oleh Nuri Che Shiddiq (NCS) jauh lebih benar, empiris, koheren, dan tahan uji**.[1]
Metode Che yang dikembangkan Nuri Che Shiddiq berhasil membongkar kekeliruan fatal dari *terrestrial bias* (bias daratan) para sejarawan Eropa.[1] Mustahil secara geospasial bagi sebuah thalassokrasi (penguasa lautan) untuk mengatur pergerakan kapal dagang sedunia, memobilisasi ratusan ribu armada Suku Laut, dan menghindari jebakan angin muson dengan menempatkan pusat komando utamanya di daerah hulu sungai berlumpur yang memiliki keterbatasan pasang surut yang ekstrem.[1] Lebih dari itu, bukti astronomi otentik dari gnomon I-Tsing pada abad ke-7 yang mensyaratkan ketiadaan bayangan absolut saat ekuinoks, merupakan hukum alam yang tidak dapat dibengkokkan oleh argumentasi teks apapun. Parameter fisika ini secara telak mematikan opsi Palembang yang berada di Lintang Selatan 3°, dan menyematkan kepastian geografis itu pada gugusan ekuator di Kepulauan Lingga.[1]
Lebih jauh, Shiddiq secara brilian mendobrak tabir intelijen sejarah, memperlihatkan bahwa "Paradigma Palembang" yang dimunculkan pada 1918 memiliki korelasi erat dengan pengamanan aset geopolitik pemerintah kolonial Belanda. Memindahkan kebesaran masa lalu dari Semenanjung dan Kepulauan Riau memberikan jalan mulus bagi eksploitasi raksasa industri pertambangan timah (SITEM) dan bauksit (NIBEM) atas wilayah Riau dan Lingga tanpa terhambat klaim kedaulatan sisa Kesultanan Riau-Lingga yang baru saja diluluhlantakkan pada tahun 1911.[1]
Pada akhirnya, keberadaan "Daun Cogan" sebagai pusaka konstitusional hidup yang mendeklarasikan kesinambungan genetik dari Wangsa Bukit Siguntang ke Kesultanan Riau-Lingga adalah bukti bahwa daulat kemaharajaan tersebut tidak mati tenggelam di pedalaman Sumatra, melainkan terus hidup, berlayar, dan berevolusi memegang takhta selat dunia.[1] Oleh karena itu, dalam konteks kedaulatan fungsional, kemaharajaan ekonomi, dan pengendalian navigasi, wilayah Bintan, Tanjung Pinang, hingga Lingga di Kepulauan Riau adalah jantung komando operasional Sriwijaya yang sesungguhnya. Restorasi historis yang diajukan oleh Nuri Che Shiddiq bukan sekadar klaim lokalitas alternatif, melainkan sebuah dekolonisasi keilmuan yang mutlak diperlukan untuk mengembalikan kejayaan maritim Nusantara ke posisi aslinya: di atas hamparan samudera ekuatorial dunia.

Karya yang dikutip

1. sriwijaya ilmu pasti.pdf
2. ogy George Cœdès and Śrīvijaya: From Epigraphy to Archeology - Angkor Database,,

https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/manguin-jp-srivijaya-coedes-jss113-2025.pdf
3. George Cœdès and Śrīvijaya | The Journal of the Siam Society - ThaiJo, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/pub_jss/article/view/290114
4. Evaluasi Nuri Che Shiddiq dalam Historiografi Melayu | PDF - Scribd, https://id.scribd.com/document/924428712/Verifikasi-Penemuan-Nuri-Che-Shiddiq-Hulu-Riau
5. Here is an Example of the Problem with the Scholarship on “Srivijaya” - Le Minh Khai's SEAsian History Blog - archive, https://leminhkhai.wordpress.com/2024/02/20/here-is-an-example-of-the-problem-with-the-scholarship-on-srivijaya/
6. When was Melaka founded and was it known earlier by another name? Exploring the debate between Gabriel Ferrand and Gerret Pieter Rouffaer, 1918–21, and its long echo in historiography | Journal of Southeast Asian Studies - Cambridge University Press & Assessment, https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies/article/when-was-melaka-founded-and-was-it-known-earlier-by-another-name-exploring-the-debate-between-gabriel-ferrand-and-gerret-pieter-rouffaer-191821-and-its-long-echo-in-historiography/CAA1748860BCD9B6247F6BFA6231278A
7. TRACES OF SRIVIJAYA TRADE AND CULTURE: CERAMICS AND ANCIENT MONEY FOUND IN THE MUSI RIVER, PALEMBANG, https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/download/5129/3071
8. At the Origins of Srivijaya: The Emergence of State and Cities in Southeast Sumatra Pierre-Yves MANGUIN (Professor Emeritus, Éc, https://toyo-bunko.repo.nii.ac.jp/record/6689/files/MASR05-28.pdf
9. (PDF) Srivijaya: Trade and Connectivity in the Pre-modern Malay World - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/350972965_Srivijaya_Trade_and_Connectivity_in_the_Pre-modern_Malay_World
10. Pierre-Yves Manguin - Angkor Database,https://angkordatabase.asia/authors/pierre-yves-manguin
11. Sriwijaya - Inggris | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/981459379/Sriwijaya-inggris
12. EARLY INTERACTIONS BETWEEN SOUTH AND SOUTHEAST ASIA - ISEAS Publishing,https://bookshop.iseas.edu.sg/component/get/12976
13. Sriwijaya- Dekonstruksi Historiografi Kolonial | PDF - Scribd, https://id.scribd.com/document/981459382/Sriwijaya-Dekonstruksi-Historiografi-Kolonial
14. Sriwijaya- Arsitektur Kayu Dan Lokasi Pusat | PDF - Scribd, https://id.scribd.com/document/981459383/Sriwijaya-Arsitektur-Kayu-Dan-Lokasi-Pusat
15. Srivijaya- The Riau-Lingga Paradigm – a Geospatial | PDF | Strait Of Malacca - Scribd, https://www.scribd.com/document/981459378/Srivijaya-The-Riau-Lingga-Paradigm-a-Geospatial

16. Prosperous Period of Srivijaya-CT - Flip eBook Pages 151-196 | AnyFlip, diakses Maret 1, 2026, https://anyflip.com/ddshk/jcwq/basic/151-196
17. A record of the Buddhist religion as practised in India and the Malay archipelago - Discovering Buddha, https://www.discoveringbuddha.org/wp-content/uploads/2024/10/1896-A-Record-of-the-Buddhist-Religion-in-India-the-Malay-Archipelago-I-Tsing-Takakusu-1896.pdf
18. Orang Laut - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Orang_Laut
19. An Analysis of Family Structures and Daily Life Among the Sea Tribe in Riau: A Cultural Perspective,https://jurnal.ubhinus.ac.id/IC-ITECHS/article/download/1685/984
20. The Water World of the Orang Suku Laut in Southeast Asia, https://os.pennds.org/archaeobib_filestore/pdf_articles/TRaNS/2016_4_2_Chou.pdf
21. COGAN - KECAMATAN BATAM KOTA, https://kecbatamkota.batam.go.id/2020/07/08/cogan/
22. COGAN: SIMBOLISASI LEGITIMASI KESULTANAN RIAU-LINGGA | Rambe | Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/journalhistoria/user/setLocale/NEW_LOCALE?source=%2Findex.php%2Fjournalhistoria%2Farticle%2Fview%2F4846%2Fpdf
23. Arkeologi dan Teori Strategis Pulau Posek | PDF - Scribd, https://id.scribd.com/document/986241717/Arkeologi-dan-Teori-Strategis-Pulau-Posek
24. The Sassanid Diaspora and the Birth of Early Srivijaya in the Riau | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/988322379/The-Sassanid-Diaspora-and-the-Birth-of-Early-Srivijaya-in-the-Riau
25. Salinan Terjemahan Sriwijaya_ Diaspora Persia Dan Sejarah Alternatif | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/988407330/Salinan-Terjemahan-Sriwijaya-Diaspora-Persia-Dan-Sejarah-Alternatif
26. NSC Highlights - ISEAS - Yusof Ishak Institute, https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/NSC_Highlights_11.pdf
27. Thinking Through Srivijaya: Polycentric Networks in Traditional Southeast Asia - The International Studies Association,http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/23e81aa1-2e38-42a5-86f5-d95c45e4d9ce.pdf
28. (PDF) The Capital of Srivijaya - Academia.edu, https://www.academia.edu/34273392/The_Capital_of_Srivijaya
29. Uji Silang Data Nuri Che Shiddiq vs Prof. Solehah Yacob | PDF - Scribd, https://id.scribd.com/document/974307770/Uji-Silang-Data-Nuri-Che-Shiddiq-vs-Prof-Solehah-Yacob